

## ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DESA WISATA (Studi pada Desa Wisata Ekang di Kabupaten Bintan)

Dory Gurvantry<sup>1(a)</sup>, Andres Febriansah<sup>2(b)</sup>, Junus Tampubolon<sup>3(c)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>a)</sup>dorygurvantry123@email.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

01-10-2022

Diterbitkan Online:

31-10-2022

#### Kata Kunci:

Desa Wisata, Collaborative  
Governance, Kemitraan

#### Keywords:

Tourism Village,  
Collaborative Governance,  
Partnership

#### Corresponding Author:

dorygurvantry123@email.com

### ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Pemerintah dalam upaya peningkatan perekonomian. Salah satu sektor yang menarik minat pengunjung adalah Desa Wisata Ekang Di Kabupaten Bintan. Melihat bahwa posisi desa yang sangat strategis dan asri akan keindahan alam sehingga desa wisata ini harus dapat menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan dalam pengembangan desa wisata. Hal ini di buktikan dengan kondisi kekuatan dari keunikan dan keindahan alam yang mempesona. Selain itu lingkungan yang asrih juga menjadi salah satu kekuatan di wilayah tersebut. Untuk lebih mendukung pengembangannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, Pola kemitraan atau kerjasama yang intensive, Kegiatan Pemerintahan di Desa yang promotif, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran stakeholder yang terlibat serta strategi pengembangan dari Ekang Kabupaten Bintan. Metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah stakeholder saling terkait perannya dalam pengembangan serta bagaimana pola pemerintah dalam mengembangkan daerah akan berdampak pada kemajuan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Kabupaten Bintan menerapkan Collaborative Governance dalam mengembangkan sektor pariwisatanya.

### ABSTRACT

Tourism is one of the Government's mainstay sectors in an effort to improve the economy. One sector that attracts visitors is the Ekang Tourism Village in Bintan Regency. Seeing that the position of the village is very strategic and beautiful in its natural beauty, so this tourist village must be able to use its strength to take advantage of opportunities in developing tourist villages. This is evidenced by the state of the power of the uniqueness and enchanting natural beauty. Besides that, the beautiful environment is also one of the strengths in the region. To further support its development, competent human resources (HR) are needed, intensive partnership or cooperation patterns, promotive government activities in villages. This study aims to see how the roles of stakeholders are involved and the development strategy of Ekang Bintan Regency. The result of the research is that stakeholders have an interrelated role in the development and how the government pattern in developing regions will have an impact on the progress of the region concerned. In this case, Bintan Regency implements Collaborative Governance in developing its tourism sector.

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.65>



## PENDAHULUAN

Suatu pembangunan dikatakan optimal ketika potensi yang dimiliki wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan, dengan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya penunjang seperti modal dan teknologi informasi. Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Desa yang merupakan bagian dari daerah memiliki kontribusi besar untuk kemajuan suatu daerah.

Desa dalam hal ini memiliki kontribusi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Dengan menggali potensi desa yang dimiliki dengan tujuan pengembangan dan kemajuan desa, masyarakat akan optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Di beberapa daerah, salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan yaitu pariwisata. Pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, dapat berperan aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya daerah. Dalam buku yang berjudul *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata* (Sedarmayanti, 2014) mengungkapkan bahwa kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Komponen pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan kepariwisataan antara lain pemerintah, dunia usaha atau industri, masyarakat (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pers, LSM, dan akademisi).

Salah satu Daerah di Kepulauan Riau dengan potensi pariwisata yang unggul adalah di kabupaten Bintan, Pengembangan sektor pariwisata Eyang Kabupaten Bintan ini sangat membutuhkan daya dukung yang optimal. Daya dukung dalam hal ini menjadi pokok penting dalam pengembangan kepariwisataan, tidak hanya daya dukung lingkungan tetapi juga daya dukung yang berhubungan dengan modal, aksesibilitas, sarana prasarana umum, serta fasilitas umum. Juga yang tidak kalah penting adalah sinergitas antar daerah dalam konteks pengembangan kepariwisataan, karena dengan tidak tersedianya daya dukung yang baik bagi

pengembangan kepariwisataan, desa Eyang kabupaten Bintan tidak dapat secara optimal mengembangkan sektor pariwisatanya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerjasama dan integritas aktor-aktor di dalamnya. Ketersediaan daya dukung tersebut tidak dapat dijalankan oleh salah satu aktor saja tetapi harus melibatkan aktor-aktor yang dapat mendukung pengembangan desa wisata.

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Eyang Kabupaten Bintan, peran pemerintah menjadi kunci utama. Bagaimana pola pemerintah dalam mengembangkan daerah akan berdampak pada kemajuan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Kabupaten Bintan menerapkan Collaborative Governance dalam mengembangkan sektor pariwisatanya. Collaborative governance (Jung et al., 2009) adalah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalkan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. Dalam konteks ini, Collaborative Governance merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik.

Peran aktor yang terlibat, diantaranya terdiri dari peran pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi dan juga media. Peran dari pemerintah adalah sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan serta mengintegrasikan program-program daerah dengan program pusat. Integrasi program-program di daerah dengan program di pusat merupakan hal yang penting karena jika tidak ada keterkaitan maka program yang dijalankan tidak ada acuan dan dasarnya. Hal tersebut lebih jauh lagi dapat menghambat proses pemantauan dari pusat ke daerah maupun pelaporan dari pemerintah daerah ke pusat.

Peran dari masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam hal menyuatkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas masyarakat yang mana program-

program dari komunitas masyarakat tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari program pemerintah.

Sektor swasta juga memiliki andil untuk memberikan suntikan berupa hal-hal yang bersifat materi maupun non materi. Tentunya pihak pemerintah dapat terbantu dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta, baik dalam hal penyediaan modal maupun kerjasama berupa program-program pemerintah dengan sektor swasta yang dapat disinergikan seluruh sektor mendapatkan kebermanfaatannya dari kerjasama yang dibangun.

Peran dari pihak media adalah bagaimana media dapat menjadi alat untuk mendukung pihak pemerintah dalam hal sosialisasi dan promosi sehingga eksistensi dari pemerintah dalam menjalankan programnya dapat tersosialisasi dengan baik sehingga informasi akan program yang telah dirumuskan pemerintah dapat secara optimal sampai kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya media, masyarakat akan dimudahkan untuk mendapatkan informasi. Salah satu aktor yang tidak kalah penting perannya dalam pembangunan adalah dari sektor akademisi. Akademisi merupakan aktor yang dibutuhkan dalam hal merumuskan suatu kebijakan dan program. Dengan dirumuskannya naskah akademik oleh akademisi yang berisi rekomendasi dan arahan kebijakan dan program berdasar pada format dan sistem yang telah diatur, maka hal tersebut akan membantu pihak pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, bukan kebijakan yang tidak berdasar pada teori. Hal tersebut yang telah dipaparkan di atas melatar belakangi untuk menganalisis bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor dalam rangka membangun desa wisata di Desa E kang, Kabupaten Bintan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa bagaimana pembangunan kawasan desa wisata melalui pendekatan *collaborative governance* di Desa E kang, Kabupaten Bintan.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data sekunder. Data sekunder berupa informasi media dan internet. Penelitian ini berfokus pada Desa E kang di Kabupaten Bintan. Desa wisata E kang Anculai, kecamatan Teluk Sebong, kabupaten Bintan, Pengelola desa wisata E kang

Anculai dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, yang bekerja sama dengan Karang Taruna desa setempat dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang menjadi contoh salah satu destinasi yang berkelanjutan di Kabupaten Bintan. Sehingga dapat menjadikan acuan tentang bagaimana peran aktor dalam mendukung membangun desa wisata. Pembangunan desa wisata berfokus pada bagaimana pembangunan desa secara berkesinambungan diarahkan pada aspek kepariwisataan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hal yang disuguhkan oleh desa wisata adalah tetap terjaganya kualitas kehidupan masyarakat desa dan keaslian daerah setempat. Keaslian tersebut mencakup keaslian ekonomi, fisik, kultur dan sosial daerah tersebut. Pemerintah sebagai penentu kebijakan sekaligus pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan harus mampu menggerakkan seluruh komponen dibawahnya untuk mengembangkan desa wisata. Dalam mengembangkan desa wisata, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, harus melibatkan berbagai pihak lain yang dapat menjadi faktor pendukung kemajuan desa wisata seperti swasta, organisasi-organisasi, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Deddy Mulyadi (2016:72) menjelaskan bahwasannya implementasi kebijakan memiliki enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu: pertama, standar dan sasaran kebijakan standar dan sasaran harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang menyebabkan terjadinya konflik antar implementasi, kedua, Sumber daya kebijakan perlu didukung oleh sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia ketiga, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilannya yang diinginkan. keempat karakteristik agen pelaksana sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yang mendukung atau menolak. Kelima, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Desa memiliki peran yang besar dalam menjaga ekosistem yang ada di bumi. desa berperan besar

dalam mengimbangi aktivitas yang menimbulkan pencemaran di daerah perkotaan. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di level desa untuk menopang keseimbangan lingkungan. Pertama, menjaga lingkungan dengan mempertahankan kearifan lokal. Kedua, membuat energi terbarukan dengan memanfaatkan limbah ternak. Keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam misal air, hutan, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Dalam implementasi terbentuknya desa wisata tersebut tentunya sangat diperlukannya peran aktif swasta maupun non swasta dalam dukungan terhadap terwujudnya pembangunan tersebut dan tidak lepas atas kesepakatan antara pihak terkait. Inilah yang menjadi bentuk tentang bagaimana memanfaatkan lebih jauh desa wisata tersebut sebagai modal ekonomi kabupaten bintang. Selain dari pada itu, perlu mitra kerja terhadap pihak swasta terhadap masyarakat, dimana manfaat yang diterima dari adanya kemitraan yang utama adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan masyarakat lebih memahami keadaan lingkungannya yang menyandang predikat desa wisata sehingga masyarakat harus memiliki kemampuan yang lebih demi memajukan memajukan desanya, telah diketahui bahwa bentuk kemitraan yang ada diimplementasikan lewat berbagai kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan produk yang melibatkan masyarakat, selain itu juga memberikan kepuasan bagi pemerintah setempat karena dengan banyaknya kemitraan yang terbangun sedikit banyak turut membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan maupun pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Bintang dan juga wisatawan yang berkunjung ke desa E kang, serta memberikan manfaat bagi pelaku industri yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di luar Desa Wisata E kang dalam mempromisikan produk mereka ke lingkup yang lebih luas. Kerjasama maupun kemitraan harus dibangun antar aktor agar dapat segera mencetak desa wisata yang berdaya jual dengan cara melibatkan seluruh pihak agar turut berpartisipasi dalam mengelola desa wisata.

Greve & hodge (2013: 57-65) menjelaskan bahwa PPP didefinisikan sebagai Kerja sama antara pelaku swasta publik di mana mereka bersama-sama mengembangkan produk dan layanan dan berbagi risiko, biaya, dan sumber daya yang terkait dengan produk dan layanan. Lalu, kemitraan dalam infrastruktur dianggap

sebagai kesepakatan antara pemerintah dan satu atau lebih mitra swasta (yang termasuk dalam operator dan pemodal) yang memberikan layanan sedemikian rupa sehingga tujuan penyampaian layanan disesuaikan dengan keuntungan tujuan mitra swasta dan keefektifan penyelarasan tergantung pada transfer risiko yang cukup kepada mitra swasta. Dalam melakukan kerjasama ini, risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilih/dibagi kepada pemerintah dan swasta dengan melibatkan investasi yang besar. Untuk menciptakan sebuah kerjasama/hubungan yang sukses sangat penting untuk memahami tujuan dan kepentingan dari masing-masing pelaku PPP.

Bentuk promosi terhadap kekayaan alam termasuk dalam peningkatan kualitas desa wisata tersebut, Ada beberapa tinjauan penelitian yang dipakai sebagai bahan perbandingan terkait dengan rumusan masalah. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erliyanto (2012), yaitu "Strategi Pemasaran The Bush Telegraph di Seminyak Kuta-Bali", yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan analisis SWOT dapat diperoleh strategi pemasaran berupa peningkatan promosi, meningkatkan kerjasama dengan banyak travel agent, menjaga kualitas produk makanan dan minuman, menjaga kualitas pelayanan yang baik, menjaga hubungan baik dengan restoran lain dan menambah variasi. Melakukan promosi dengan menggunakan peran media, internet dan perkembangan teknologi serta ikut terlibat dalam event-event pariwisata yang diselenggarakan, peran media sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas serta menjadikan desa wisata tersebut dapat bersaing pada kelas atas, Menggali dan menemukan potensi lain yang dimiliki oleh desa wisata sehingga memperluas target pasar.

Sesuai dengan teori kemitraan menurut Adisasmita menyebutkan bahwa kemitraan (partnership) antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Berkaitan dengan hal tersebut sudah sesuai pada pengembangan pariwisata yang terjadi di desa E kang, dimana dalam pengembangannya menggunakan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dampak positif yang dirasakan dari adanya kemitraan tersebut yaitu memberikan manfaat dalam lapangan pekerjaan

dengan memperdayakan masyarakat sekitar dan nantinya masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan serta perekonomiannya, selain itu kondisi ini juga tentunya dapat membantu pemerintah dalam menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran didesa.

Pada bentuk kerja sama yang dijalankan sebagai bentuk peningkatan tersebut, desa ekang menggunakan prinsip Azas Manfaat Bersama (mutual benefit) Hal ini sudah sesuai dengan kemitraan yang sudah dijalankan dalam pengembangan pariwisata di Desa Ekang yang menerapkan prinsip manfaat bersama (mutual benefit). Dimana manfaat bersama yang didapat dari masing-masing pihak tentu berbedabeda, manfaat yang didapat pemerintah baik desa maupun kabupaten yaitu adanya penyerapan tenaga kerja, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran didesa, selain itu pemerintah juga dapat membantu masyarakatnya.

## **PENUTUP**

Dalam terbangunnya Desa Wisata Ekang Di Kabupaten Bintang merupakan konsep yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, yang bekerja sama dengan karang taruna desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Ekang Anculai. Dalam pengelolaan daya tarik wisata Desa Wisata Ekang Di Kabupaten Bintang menghadapi beberapa hambatan diantaranya sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang masih terpola tradisional, yaitu minimnya peran stakeholder kepariwisataan dalam mengembangkan desa wisata, belum terjalannya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, pokdarwis dan masyarakat. Terkait dengan kerja sama, desa ekang menjalankan prinsip Azas Manfaat Bersama (mutual benefit) Hal ini sudah sesuai dengan kemitraan yang sudah dijalankan dalam pengembangan pariwisata di Desa Ekang yang menerapkan prinsip manfaat bersama (mutual benefit). Dan inilah yang menjadi peningkatan dalam mewujudkan collaborative Government.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cristina Ratu. 2016, Strategi Pemasaran Desa Wisata Blimbingsari Kabupaten Jembrana. Universitas Udayana, Jurnal Destinasi Pariwisata. Denpasar. Vol. 4 No. 1
- Hasfah, Mohammad Jafar. (2000). Kemitraan Usaha : Kosepsi dan Strategi. PT.Penebar Swadaya.Jakarta  
<https://kumparan.com/kepedia/desa-wisata-ekang-contoh-wisata-berkelanjutan-di-bintang>
- Tia Subekti, 2019. Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang, Universitas Brawijaya.
- Yaya Sandra Liza, Afrizal, Nazaki. 2019. Implementasi Kemitraan Pihak Ke Tiga Oleh Bumdes Ekang Anculai. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Yuliana Isnaningtyas. Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Universitas Diponegoro